BAB I
PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat akan menciptakan dan meningkatkan kapasitas, baik secara dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan merupakan tahap dalam pemberdayaan dimana suatu tuntutan merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas pemberdayaan dengan maksud pendayagunaan masyarakat yang berdayaguna. Penyelenggara pemberdayaan adalah lembaga dan petugas pemberdaya masyarakat baik pemerintah pusat, daerah sampai tingkat desa yang menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah hingga desa serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah. Mengingat fungsi dari pemerintah adalah melayani, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Masyarakat

juga merupakan pangkal dari keberhasilan pemerintah sehingga perlu diberdayakan dan melakukan pembangunan. Sehingga yang sekarang menjadi tugas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah khusunya Pemerintah Desa adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat, memberikan pemberdayaan dan pembangunan.

Desentralisasi telah melahirkan adanya otonomi daerah. Lahirnya otonomi daerah, setiap daerah dibagi kedalam beberapa wilayah yang meliputi wilayah provinsi, kabupaten/kota bahkan desa. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan iklim pemerintahan daerah yang lebih maju dan mampu menghasilkan pemberdayaan masyarakat yang berdampak kepada pembangunan yang merata, luas dan bertanggungjawab. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mana mengisyaratkan bagi setiap daerah untuk bekerja lebih. Dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah agar terciptanya kondisi yang harmonis antar pemerintahan.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonom asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran tersebut, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Secara administratif Desa Cibeusi merupakan salah satu dari tujuh desa di wilayah Kecamatan Ciater Kabupaten Subang yang terletak ± 3 Km ke arah timur Kecamatan Ciater. Desa Cibeusi Kecamatan Ciater berada di

ketinggian 8,80 mdl diatas permukaan laut dengan wilayah ± 364 Hektar. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Usaha tersebut dilihat dari kegiatan manusia berjuang demi kelangsungannya itu, setiap usaha mempunyai usaha yang berbeda-beda menurut kemampuan mereka. Penduduk Desa Cibeusi Kecamatan Ciater Kabupaten Subang umumnya bermata pencaharian sebagai buruh tani dan pengrajin olahan alam sehingga keadaan ekonomi di Desa Cibeusi Kecamatan Ciater Kabupaten Subang lebih di dominasi oleh ekonomi menengah kebawah.

Desa Cibeusi Kecamatan Ciater Kabupaten Subang memiliki potensi yang cukup besar, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sampai saat ini potensi sumber daya belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya hambatan-hambatan yang ada. Potensi yang ada misalnya Sumber Daya Alam (SDA) antara lain adanya sumber mata air produktif sebanyak dua titik, tersedianya bahan baku berupa kayu, batu dan pasir, dan merupakan daerah agraris. Pengelolaan SDA tersebut belum dapat maksimal dijalankan dengan baik terlebih masyarakat sebagian besar bekerja secara individu, apabila dilihat dari hasil SDA tersebut Desa Cibeusi memiliki prioritas-prioritas unggulan yang dapat menunjang penghidupan desa misalnya Desa Cibeusi yang terkenal akan beras hitam, sapu uyun, gula aren dan lain sebagainya. Sampai saat ini Desa Cibeusi belum merasakan apa yang seharusnya sudah menjadi hak paten daerah. Sebagian petani dan pengrajin hanya mampu menjual hasilnya kepada para pengepul dan tengkulak-tengkulak tertentu dengan harga seadanya yang mana para pengepul ini mereka menjual kepada tempat atau wilayah-wilayah tertentu yang membutuhkan pasokan kebutuhan tersebut tanpa memperhatikan darimana asal-usul hasil penjualannya tersebut. Minimnya sosialisasi pariwisata dan SDA yang dilakukan oleh pihak aparatur menjadikan masalah serius dalam hal ini. Sehingga yang awalnya masyarakat seharusnya paham akan pengelolaan dan pemanfaatan SDA ini menjadi yang serba tradisional dan biasa saja.

Pada dasarnya Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Cibeusi antara lain adanya warga yang menempuh sekolah tingkat tinggi, adanya penduduk yang ahli dalam berbagai bidang, dan banyaknya penduduk yang berprofesi sebagai guru. Sedangkan hambatan yang sedang dihadapi antara lain kehidupan masyarakat sebagian besar berwirausaha dibandingkan untuk bersekolah tinggi, adanya pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat desa.

Kelurahan Desa Cibeusi bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unikom (Prodi IP FISIP Unikom) melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam satu wadah Kuliah Kerja Lapangan – Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKL-PPM). Satu diantaranya adalah Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM), inilah salah satu wujud kegiatan yang dimaksud. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi suatu tolok ukur kesejahteraan masyarakat yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung diberdayagunakan atau diberdayakan berdasarkan kualitas pemberdayaan yang diterima. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kegiatan lebih jauh tentang pemberdayaan masyarakat di Desa Cibeusi Kecamatan Ciater Kabupaten Subang dalam Laporan KKL-PPM yang berjudul : **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Potensi Sumber Daya Alam Desa Cibeusi Kecamatan Ciater Kabupaten Subang”**.